

## BAB V

### SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dengan menggunakan Kota, Kabupaten dan Propinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian dari hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tahun berjalan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tahun berjalan diterima, artinya besarnya nilai DAU mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif dan signifikan).
2. Hasil pengujian dari hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tahun berjalan diterima, artinya besarnya nilai PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif dan signifikan).
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang tujuannya adalah untuk mengetahui terjadi tidaknya *flypaper effect* pada hubungan pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (pengaruh positif dan signifikan).
4. Hasil pengujian hipotesis keempat yang tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh *flypaper effect* pada hubungan pengaruh DAU dan PAD terhadap

5. Penelitian di atas membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten/kota di Propinsi DIY masih tergantung dari dana yang berasal dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) di mana pemerintah Kabupaten/kota di Propinsi DIY lebih banyak menggunakan DAU daripada menggunakan PAD, meskipun sudah diterapkan sistem Desentralisasi tetapi sampai sekarang pemerintah Kabupaten/kota di Propinsi DIY belum bisa mandiri dalam memenuhi belanjanya.
6. Desentralisasi diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengelola keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari: pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah

#### **B. Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya meliputi Kota dan Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu yang pendek yaitu 7 tahun.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga tingkat validitas data sangat ditentukan oleh sumber data berupa dokumentasi laporan realisasi APBD yang ada di BPS. Peneliti hanya bisa melakukan secara terbatas dengan melakukan cross check berupa observasi pada Kota dan Kabupaten di Propinsi DIY.

### C. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Jumlah sampel hendaknya lebih diperbesar dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga hasilnya dapat digeneralisir.
2. Periode waktu penelitian hendaknya lebih diperpanjang sehingga dapat diketahui kecenderungannya dalam jangka panjang.
3. Pemerintah pusat hendaknya menyampaikan APBN dan Kepres tentang DAU jauh sebelum tahun berjalan sehingga daerah dapat menyusun APBD dengan lebih baik. Daerah akan lebih siap menaksir jumlah belanja tahun berjalan, serta kebijakan pajak dan retribusi daerah apabila masih terdapat *gap* antara DAU dengan PAD serta pemerintah daerah di masing-masing Kabupaten/kota membuat transparansi APBD kepada publik seperti: koran, majalah, internet, dll.
4. Untuk Pemerintah Daerah, seharusnya berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari pajak daerah, diperlukan inventarisasi potensi masing-masing jenis pajak daerah sehingga diperoleh data mengenai potensi pajak yang akurat dalam rangka mengintensifikasi pungutan, melakukan pengkajian kembali jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak mampu menghasilkan penerimaan memadai dan menghapuskannya, memperbaiki sistem pemungutan pajak dalam rangka mengurangi biaya tinggi dalam pengelolaan pajak dan menggali potensi-potensi daerah.

5. Kesadaran Masyarakat akan pentingnya pajak daerah harus ditingkatkan karena pajak adalah salah satu PAD yang paling tinggi sebagai penerimaan daerah serta bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat